



# Demokrasi Deliberatif dalam Tata Kelola Perikanan

**R**encana pemerintah Indonesia hendak menerbitkan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota patut dikritisi.

Pasalnya, Indonesia tak punya pengalaman empiris termasuk negara Asean.

Sistem kuota umum berlaku di negara-negara subtropis. Wilayah ini keragaman spesies ikannya rendah tapi kelimpahannya tinggi seperti salmon, cod, herring, dan king crab.

Basis data stok sumber daya ikannya lengkap setiap spesies, meskipun sistem kuota tak selamanya sukses. Bedanya, negara tropis semacam Indonesia jenis ikannya multi spesies. Keragaman tinggi tapi kelimpahannya rendah. Indonesia juga tak memiliki data stok sumber daya ikan per spesies tapi hanya per kelompok spesies (Kepmen KP No. 50/2017). Perhitungannya berbasis data pendaratan ikan di pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan.

Problemnya, ikan yang didaratkan di pelabuhan Muara Baru Jakarta tak semuanya ditangkap di perairan Laut Jawa atau Selat Sunda. Kemungkinan ditangkap di Samudera Hindia atau Laut China Selatan sehingga tak merepresentasikan wilayah pengelolaan perikanan.

Penangkapan berbasis kuota/kontrak membagi wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI) terdiri 7 zona industri, 3 zona nelayan lokal dan 1 zona perlindungan.

Ironisnya perikanan berba-

sis komunitas/adat dan perlindungan nelayan diabaikan.

Secara ekonomi politik global, tata kelola perikanan mengenal dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi representatif dan deliberatif (Hatchard, 2005). Demokrasi representatif berlaku dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Demokrasi deliberatif berlangsung agar menghindari tindakan pengelolaan eksploitatif.

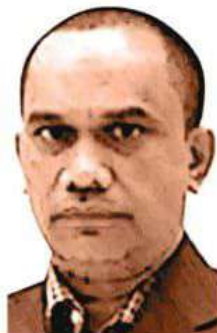
Ciri khas demokrasi representatif adalah lemahnya elektoral dan menguatnya korporat. Sementara demokrasi deliberatif adalah tingginya partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola perikanan semenjak penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan.

Dalam tata kelola perikanan ada yang bersifat negatif karena memicu krisis perikanan. *Pertama*, bersifat sentralistik atau terpusat sehingga mengabaikan partisipasi semua pengguna sumber daya dalam pengambilan keputusan.

*Kedua*, politisasi kebijakan perikanan karena hanya berdasarkan pertimbangan politik tapi mengabaikan keilmuan dan ekonomi.

*Ketiga*, eksternalisasi yakni keengganan korporasi pemilik kuota menanggung akibat penggunaan alat tangkap ikan merusak ekosistem laut misalnya trawl. Imbasnya, wilayah tangkap dan kelola komunitas nelayan dan masyarakat adat dan kawasan konservasi laut terancam.

Konstruksi kebijakan penangkapan perikanan terukur bisa dikategorikan tata kelola perikanan negatif karena sifatnya sentralistik dan eksternalisasi, hingga



MUHAMMAD KARIM  
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan & Peradaban Maritim/Dosen Universitas Trilogi Jakarta

bermuatan kepentingan politik 2024. Tampak masyarakat pesisir mesti berhadapan dengan kemauan pemerintah pusat lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### MELIBATKAN STAKEHOLDER

Prasyarat tata kelola perikanan berkelanjutan berbasis demokrasi deliberatif adalah melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) semenjak proses penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan. Mereka berasal dari kalangan individual maupun komunitas yang (i) bergantung terhadap sumberdaya dan wilayah pengelolaan perikanan, dan (ii) berkepentingan terhadap wilayah perairannya. Jika praktiknya terpenuhi, bakal menciptakan keadilan distributif (Hatchard, 2005). Caranya, *pertama*, mereka mesti berdialog intensif untuk mencapai konsensus bersama.

*Kedua*, mereka mesti berada berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dan (ii) mengedepankan "inklusi sosial" supaya menghindari kesenjangan partisipasi yang selama ini sentralistik dan *top-down* dalam pengambilan keputusan.

Sayangnya, kebijakan penangkapan perikanan terukur mengabaikan prinsip demokrasi deliberatif dalam proses penyusunannya, khususnya pelibatan masyarakat lokal/adat dan masyarakat sipil. Pemerintah lupa, di seluruh WPP-NRI beraktivitas beragam pemangku kepentingan, mulai masyarakat lokal/adat, pemerintah daerah, asosiasi, organisasi masyarakat sipil hingga kalangan ilmuwan yang konsisten terhadap tatakelola perikanan berkelanjutan.

Jika aspirasinya terabaikan, kebijakan ini bakal memicu protes dan menjurus tragedi komoditas. Pasalnya, kebijakan ini menggunakan pendekatan industrialisasi perikanan berorientasi ekspor. Nantinya memicu deplesi sumberdaya ikan, krisis ekologi, kemiskinan hingga menggerus nilai-nilai, hak kelola dan kelembagaan pemangku kepentingan. Makanya, tata kelola perikanan berbasis demokrasi deliberatif jadi keniscayaan.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya disertai dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga dilengkapi foto terbaru. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang terbagung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak memintakannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail redaksi@bisnis.com.

## SUARA PEMBACA

### Pemberdayaan Umat

Upaya pemberdayaan umat, terutama melalui pintu zakat bisa menjadi salah satu motor penggerak yang efektif.

Intinya adalah mengarusutamakan kebijakan zakat produktif dengan peningkatan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Kenapa bisa menjadi salah satu pilar penggerak? Karena memang sudah berjalan di lapangan. Kami masih ingat ketika penyaluran bantuan itu berlangsung beberap tahun lalu. Ketika itu sasarannya adalah para pengusaha skala mikro, kecil dan menengah berupa 100 gerobak dorong dan modal usaha mencapai Rp600 juta di Bekasi.

Adapun penyaluran bantuan itu dalam rangka mengarusutamakan

kebijakan zakat produktif. Bila dicermati, program dan komitmen seperti itu sungguh efektif untuk pemberdayaan. Bahkan oleh Baznas dijadikan 'kewajiban' di berbagai tingkatan dengan mengacu pada semangat Sustainable Development Goals (SDGs).

Semangat SDGs sendiri merupakan komitmen pada pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya fungsi zakat sebagai *empowering people* adalah menekan angka

kemiskinan, sehingga 'nyambung' dengan program tersebut.

Apa yang menjadi arus utama kebijakan zakat itu menemukan relevansinya yaitu agar bantuan zakat di bidang ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh asna atau pihak yang berhak menerima zakat dari kalangan fakir dan miskin.

Ahmad Burhanuddin  
Pondok Gede, Jakarta

Perwakilan: PT Akara Graha Perkasa & Receptiva (Y) Tbk. S.K. No. 18/Serikat Industri/Ngantung Telp. 021-662348 Fax 021-6605

### BERKELANJUTAN |

## emerintah dan Dinanti

n kemampuan begitu juga masalah sosial as mereka da lainnya. n bangkan dan Menurut Kartika, Indonesia

### BRI LIFE OPTIMISTIS CAPAI TARGET 2022



## FINANSIAL

